

# INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2019



# INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2019

<https://malut.bps.go.id>



**INDIKATOR KETENAGAKERJAAN  
PROVINSI MALUKU UTARA  
FEBRUARI 2019**

ISSN : 2654-9638  
No. Publikasi : 82520.1908  
Katalog : 2302003.82  
Ukuran Buku : B5 (17,6 x 25 cm)  
Jumlah Halaman : vi + 27

Naskah:  
Bidang Statistik Sosial

Penyunting:  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:  
Bidang Statistik Sosial

Penerbit :  
© BPS Provinsi Maluku Utara

Pencetak :  
CV. Rumah Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR

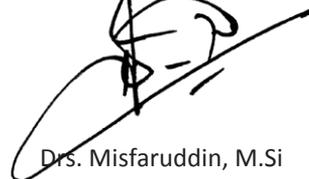
Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Februari 2019 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Februari 2019. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Ternate, Agustus 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si



## DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA	6
INDIKATOR PENGANGGURAN	15
LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK	21

<https://malut.bps.go.id>



## INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2019

### UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

*Jumlah sampel  
Sakernas Februari  
2019 Provinsi Maluku  
Utara sebanyak 104  
blok sensus (1040  
rumah tangga).*

Kemudian pada 2011-2014 Sakernas kembali dilaksanakan secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Mulai tahun 2015, Sakernas dikembalikan lagi menjadi format semesteran, yaitu pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II). Namun, pada tahun 2019 jumlah sampel nasional Sakernas Februari bertambah dari 50.000 rumah tangga menjadi 75.000 rumah tangga dengan estimasi level provinsi. Sedangkan Sakernas Agustus bertambah dari 200.000 rumah tangga menjadi 300.000 rumah tangga dengan estimasi level kabupaten/kota.

Sampel terpilih untuk Sakernas Februari 2019 di Provinsi Maluku Utara berjumlah 1.040 rumah tangga yang tersebar di 104 blok sensus. *Response Rate* pada Sakernas Februari 2019 sebesar 95,47 persen. Dengan jumlah sampel tersebut estimasi yang disajikan adalah level provinsi dengan tabel-tabel yang dirinci menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah.

## TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan informasi indikator ketenagakerjaan hasil Sakernas Februari 2019 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

## CAKUPAN

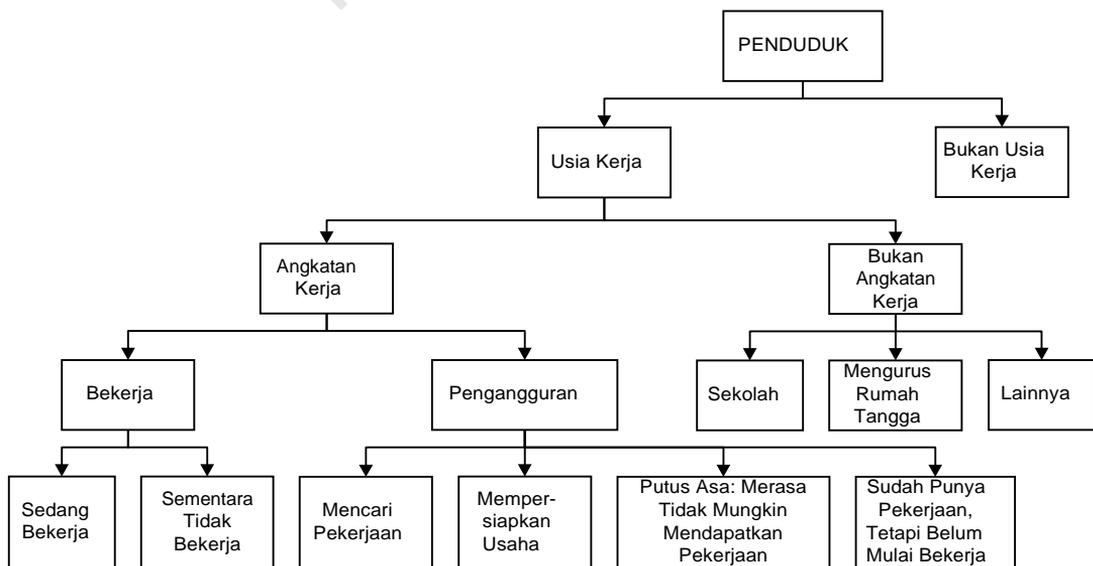
Pembahasan hasil Sakernas Februari 2019 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran dengan rincian menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan untuk melihat perkembangannya. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada konsep *International Conference of Labor Statistics (ICLS)* 13.

*Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran.*

## PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Hal ini bertujuan untuk mengikuti standar internasional yang juga digunakan di negara lain. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

**Gambar 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN**



Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 5 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah seminggu yang lalu yang berakhir satu hari sebelum pencacahan. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

## **PARTISIPASI DUNIA KERJA**

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

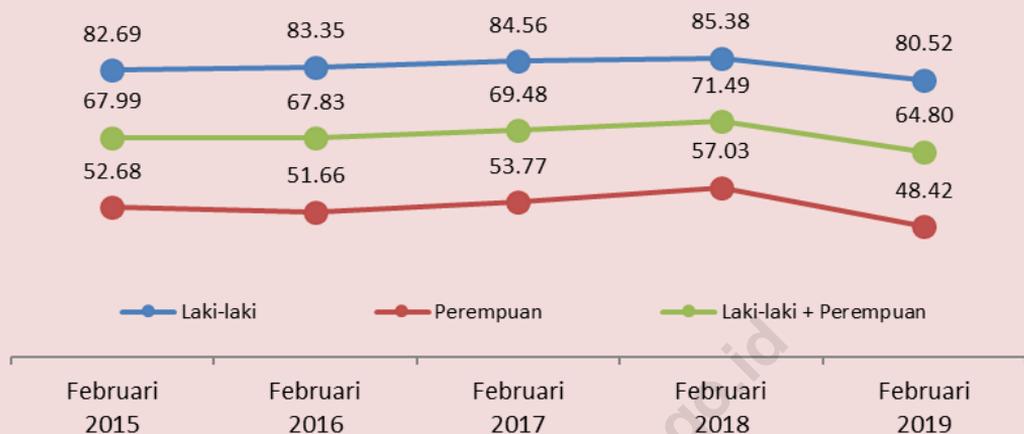
*TPAK dihitung dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas)*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja disajikan menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah untuk memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

**Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin, Februari 2015-2019**



Sumber : Sakernas Februari 2015-2019, Diolah

Pasokan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai meskipun mengalami penurunan yang cukup drastis. TPAK Provinsi Maluku Utara selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Pada Februari 2019, TPAK Maluku Utara mencapai 64,80 persen, menurun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya (71,49 persen). Angka tersebut mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 65 orang. Selebihnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Secara umum, partisipasi penduduk perempuan dalam dunia kerja cenderung lebih rendah dibanding penduduk laki-laki. Hal ini juga terjadi di pasar tenaga kerja Maluku Utara. Terlihat dari nilai TPAK dalam lima tahun terakhir, di mana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat TPAK perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di bawah 60 persen, bahkan pada Februari 2019 berada di bawah 50 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa angkatan kerja di Maluku Utara banyak disumbang oleh penduduk laki-laki.

Pada Februari 2019, TPAK laki-laki sebesar 80,52 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya (85,38 persen). Sementara itu, TPAK perempuan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 57,03 persen pada Februari 2018 menjadi 48,42 persen pada Februari 2019.

*Pada Februari 2019, TPAK Maluku Utara turun cukup drastis menjadi 64,80 persen, yang berarti terdapat sekitar 65 dari 100 orang penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi*

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2019

Klasifikasi Wilayah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	76.48	51.46	64.10
Perdesaan	82.23	47.09	65.09
Perkotaan + Perdesaan	80.52	48.42	64.80

Sumber : Sakernas Februari 2019, Diolah

Tabel 1 menyajikan keterangan tenaga kerja Maluku Utara berdasarkan klasifikasi wilayah. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja di wilayah perkotaan (64,10 persen) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perdesaan (65,09 persen). Hal ini menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Maluku Utara telah cukup merata, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

*Proporsi penduduk usia kerja yang mengisi pasar tenaga kerja di perkotaan hampir sama dibanding di perdesaan.*

Selain itu, baik di perkotaan maupun di perdesaan, dominasi penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi di Maluku Utara sangat terlihat. TPAK penduduk laki-laki hampir dua kali dari TPAK penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang aktif dalam pasar tenaga kerja di perkotaan dan perdesaan yaitu masing-masing sebesar 76,48 persen dan 82,23 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang aktif dalam pasar tenaga kerja di perkotaan lebih tinggi dibanding dengan perdesaan yaitu 51,46 persen dibanding 47,09 persen.

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2017-2019

Tingkat Pendidikan	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	42.93	41.92	35.03
SMP	17.71	16.17	15.99
SMA Umum	21.00	23.34	26.90
SMA Kejuruan	5.13	4.89	5.13
Diploma I/II/III	2.31	1.96	3.66
Universitas	10.92	11.72	13.29
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sakernas Februari 2017-2019, Diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Sebanyak 35,03 persen angkatan kerja di Maluku Utara merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD, atau tidak pernah bersekolah. Persentasenya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 41,92 persen. Meski demikian, kelompok penduduk ini masih menjadi penyumbang terbesar angkatan kerja di Maluku Utara.

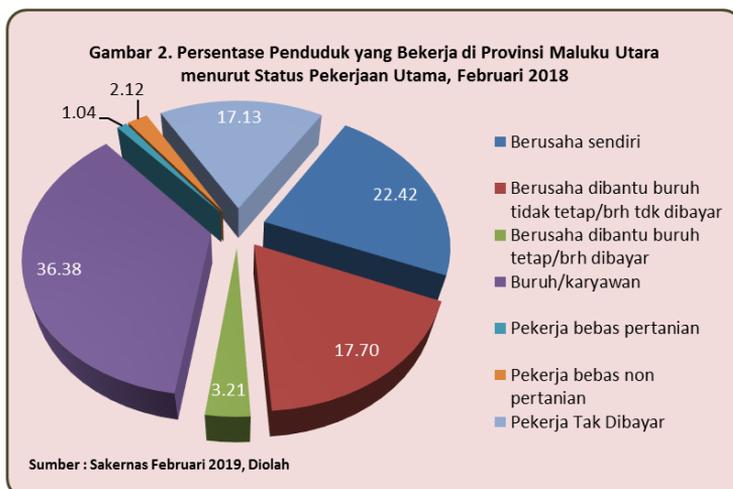
*Pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah.*

Sementara itu, kelompok penduduk dengan pendidikan SMA menyumbang angkatan kerja sebesar 26,90 persen, atau terbesar kedua. Nilai ini meningkat jika dibanding periode sebelumnya (Februari 2018) yang sebesar 23,34 persen. Kenaikan ini harus dilihat lebih rinci karena angkatan kerja bukan hanya penduduk yang bekerja, tapi juga terdapat pengangguran di dalamnya. Sebuah keuntungan jika kenaikan tersebut disumbang oleh penduduk yang bekerja. Akan tetapi, menjadi beban jika yang mengalami peningkatan adalah penduduk yang menganggur, seperti penduduk yang baru lulus sekolah tapi belum terserap di lapangan pekerjaan yang tersedia.

## PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA

### a. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kategorisasi menurut status pekerjaan bisa menjadi indikator yang menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan majunya pembangunan di suatu daerah biasanya terlihat adanya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.



Status Pekerjaan Utama pada Sakernas diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja keluarga/tidakdibayar

*Lebih dari sepertiga penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/karyawan.*

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2019, dari tujuh kategori status pekerjaan, tertinggi pertama adalah pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu 36,38 persen. Diikuti oleh penduduk yang berusaha sendiri sebesar 22,42 persen. Sementara, penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas tercatat masing-masing 1,04 persen di pertanian dan 2,12 persen di non pertanian.

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2017-2019

Status Pekerjaan Utama	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	19.01	19.29	22.42
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	21.11	21.18	17.70
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	4.56	3.87	3.21
Buruh/karyawan	29.43	31.28	36.38
Pekerja bebas pertanian	1.76	1.51	1.04
Pekerja bebas non pertanian	2.25	4.06	2.12
Pekerja Tak Dibayar	21.88	18.81	17.13
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sakernas Februari 2017-2019, Diolah

Pada 2017-2019 penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan. Pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai terus mengalami kenaikan dari Februari 2017, dan kenaikan pada Februari 2019 cukup signifikan. Sementara pekerja tak dibayar terus mengalami penurunan dari Februari 2017 sampai Februari 2019. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi mulai bergesernya tenaga kerja tak berbayar menjadi tenaga kerja berbayar.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Bekerja, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2019

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	18.52	24.06	24.65	18.57	22.42
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	10.20	20.84	19.59	14.41	17.70
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	5.13	2.40	4.17	1.54	3.21
Buruh/karyawan	51.43	30.07	38.12	33.36	36.38
Pekerja bebas pertanian	0.24	1.38	1.32	0.56	1.04
Pekerja bebas non pertanian	2.89	1.79	2.97	0.63	2.12
Pekerja Tak Dibayar	11.60	19.45	9.18	30.93	17.13
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sakernas Februari 2019, Diolah

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, penduduk yang bekerja di wilayah perkotaan lebih dari separuhnya berstatus buruh/karyawan yaitu mencapai 51,43 persen. Sementara kelompok penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas memiliki persentase terkecil dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Pekerja bebas di non pertanian tercatat sebesar 2,89 persen. Sedangkan pekerja bebas di pertanian persentasenya sangat rendah, yaitu hanya 0,24 persen.

Sementara itu, struktur penduduk yang bekerja di wilayah perdesaan menurut status bekerja cenderung merata dimana persentasenya tidak jauh berbeda antara penduduk yang berstatus berusaha sendiri (24,06 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (20,84 persen), dan buruh/karyawan/pegawai (30,07 persen). Hal lain yang cukup menarik adalah jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 19,45 persen. Angka tersebut dapat menjadi sebuah indikasi masih tingginya budaya kekeluargaan dalam bekerja.

Berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan cukup banyak yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 38,12 persen pada laki-laki dan 33,36 persen pada perempuan. Meski demikian, sebagian besar penduduk perempuan yang bekerja adalah pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 30,93 persen.

## **b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

Seiring perkembangan konsep dan jenis lapangan usaha, pengklasifikasian lapangan usaha yang digunakan oleh BPS saat ini mengacu pada KBLI 2015. Penyusunan KBLI 2015 merupakan penyempurnaan KBLI 2009 Cetakan III, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran struktur dan judul nomenklatur KBLI 2015 tidak mengubah tatacara dan makna klasifikasi.

Klasifikasi KBLI 2015 terdiri dari struktur pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Struktur klasifikasi menunjukkan format standar untuk mengelola informasi rinci tentang keadaan ekonomi, sesuai prinsip-prinsip dan persepsi ekonomi.

Dasar penyusunan KBLI 2015 adalah KBLI 2009 Cetakan III dan ISIC Rev.4 yang disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asian Manufacturing Statistics (EAMS) dan dikembangkan rinci sampai 5 (lima) digit untuk kegiatan yang spesifik di Indonesia.

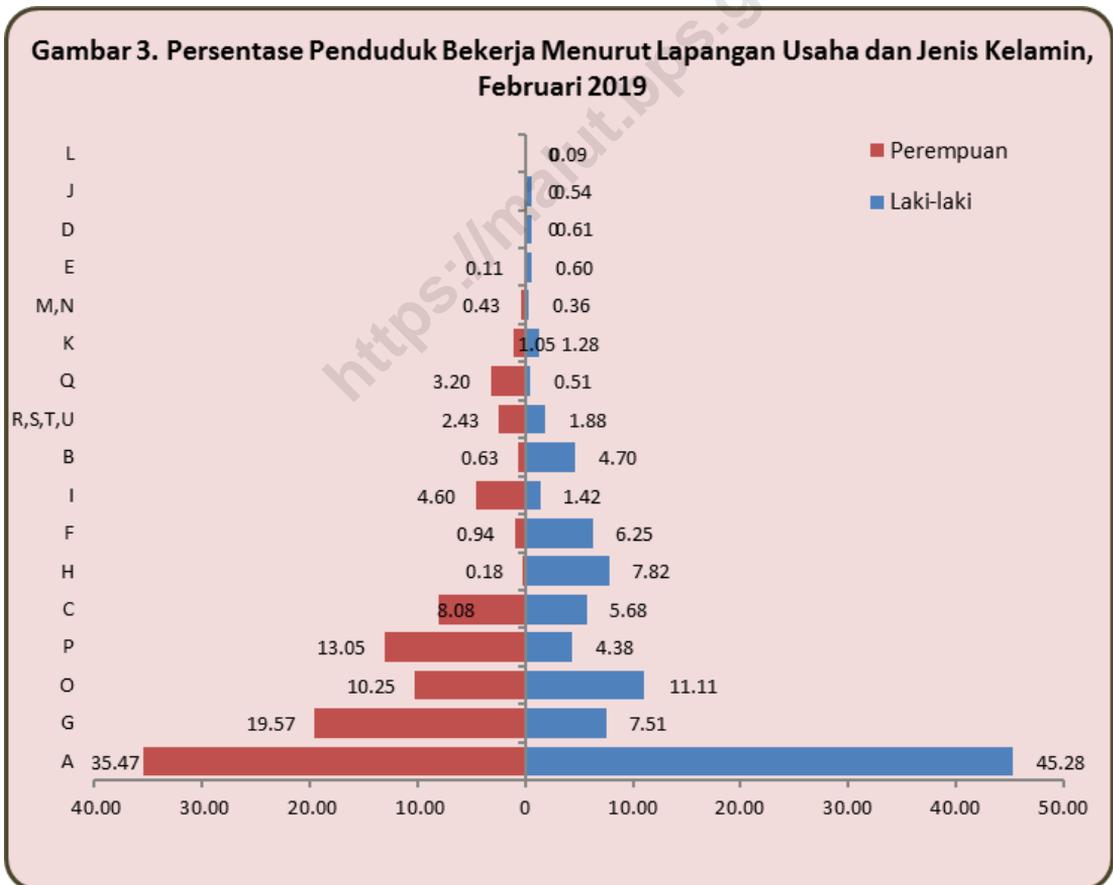
Perubahan struktur berupa pergeseran atau pengelompokan suatu kegiatan dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya, dan penambahan klasifikasi baru yang disebabkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, memungkinkan untuk terbentuknya kelompok yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan kategori lain yang lebih sesuai. Oleh karena itu, klasifikasi lapangan usaha yang digunakan dalam publikasi ini adalah menurut KBLI 2015 dengan jumlah lapangan usaha sebanyak 17 kategori yang dirinci sebagai berikut:

- Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Kategori B Pertambangan dan Penggalian;
- Kategori C Industri Pengolahan;
- Kategori D Pengadaan Listrik dan Gas;

*Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja*

- Kategori E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
- Kategori F Konstruksi;
- Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Kategori H Transportasi dan Pergudangan;
- Kategori I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Kategori J Informasi dan Komunikasi;
- Kategori K Jasa Keuangan dan Ausransi;
- Kategori L Real Estat;
- Kategori M,N Jasa Perusahaan;
- Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- Kategori P Jasa Pendidikan;
- Kategori Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- Kategori R,S,T,U Jasa Lainnya.

*Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris di mana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.*



Kategori A (Pertanian Kehutanan dan Perikanan) adalah lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku Utara. Pada 2019, penduduk yang bekerja pada kategori ini tercatat sebesar 41,69 persen. Lapangan usaha terbesar kedua di Maluku Utara adalah kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan persentase sebesar 11,92 persen.

*Selain kategori A, penduduk laki-laki banyak bekerja pada kategori O. Sedangkan penduduk perempuan banyak bekerja pada kategori G.*

Menurut jenis kelamin, lapangan usaha terbesar baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan yang bekerja ada pada kategori A (Pertanian Kehutanan dan Perikanan), yaitu 45,28 persen pada penduduk laki-laki dan 35,47 persen pada penduduk perempuan. Perbedaan cukup signifikan terlihat pada lapangan usaha terbesar kedua. pada penduduk laki-laki, lapangan usaha terbesar kedua ada pada kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sebesar 11,11 persen. Sedangkan pada penduduk perempuan, lapangan usaha terbesar kedua ada pada kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), yaitu mencapai 19,57 persen.

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b> Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	15.21	52.80	45.28	35.47	41.69
<b>B</b> Pertambangan dan Penggalian	1.78	3.81	4.70	0.63	3.21
<b>C</b> Industri Pengolahan	5.41	7.04	5.68	8.08	6.56
<b>D</b> Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	0.47	0.61	0.00	0.38
<b>E</b> Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.13	0.13	0.60	0.11	0.42
<b>F</b> Konstruksi	4.26	4.33	6.25	0.94	4.31
<b>G</b> Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20.02	8.52	7.51	19.57	11.92
<b>H</b> Transportasi dan Pergudangan	7.81	3.86	7.82	0.18	5.03
<b>I</b> Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.60	1.31	1.42	4.60	2.58
<b>J</b> Informasi dan Komunikasi	0.53	0.27	0.54	0.00	0.34
<b>K</b> Jasa Keuangan dan Asuransi	3.46	0.24	1.28	1.05	1.20
<b>L</b> Real Estat	0.19	0.00	0.09	0.00	0.06
<b>M,N</b> Jasa Perusahaan	0.56	0.31	0.36	0.43	0.38
<b>O</b> Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.09	6.90	11.11	10.25	10.80
<b>P</b> Jasa Pendidikan	7.83	7.43	4.38	13.05	7.55
<b>Q</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.55	1.47	0.51	3.20	1.49
<b>R,S,T,U</b> Jasa Lainnya	4.38	1.11	1.88	2.43	2.08
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sakernas Februari 2019, Diolah

Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, penyerapan tenaga kerja di perdesaan masih didominasi oleh lapangan usaha pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), yaitu mencapai 52,80 persen atau mencapai setengah dari jumlah penduduk bekerja di daerah perdesaan. Diikuti oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) pada posisi terbesar kedua, yaitu sebesar 8,52 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di perkotaan paling besar disumbang oleh kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib), yaitu sebesar 20,09 persen. Kemudian diikuti G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) kategori sebesar 20,02 persen.

### c. Penduduk Yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

*Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu yang lalu*

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (*Full Time Worker*) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun jika pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup maka termasuk pekerja paruh waktu (*Part Time Worker*).

Tabel 6. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Pekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Februari 2017-2019

Status Pekerja	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Bekerja	530,271	560,603	517,249
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	170,661	189,857	174,942
1. Setengah Penganggur	56,748	62,434	57,655
2. Pekerja Paruh Waktu	113,913	127,423	117,287
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	32.18	33.87	33.82
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	10.70	11.14	11.15
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	21.48	22.73	22.68

Sumber : Sakernas Februari 2017 - 2019, Diolah

*Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara mengalami fluktuasi.*

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara terus mengalami fluktuasi, yaitu dari 32,18 persen pada 2017, naik menjadi 33,87 persen pada 2018 dan turun menjadi 33,82 persen pada 2019. Pekerja tidak penuh ini terdiri dari pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Dibanding periode sebelumnya (Februari 2018), tingkat pekerja setengah penganggur maupun pekerja paruh waktu cenderung stagnan. Tingkat pekerja setengah penganggur semula sebesar 11,14 persen pada 2018 menjadi 11,15 persen pada Februari 2019. Sedangkan tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2018 sebesar 22,73 persen menjadi 22,68 persen pada Februari 2019.

Tabel 7. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara Menurut Status Bekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk yang Bekerja	152,832	364,417	328,168	189,081	517,249
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	34,040	140,902	90,649	84,293	174,942
1. Setengah Penganggur	10,058	47,597	34,170	23,485	57,655
2. Pekerja Paruh Waktu	23,982	93,305	56,479	60,808	117,287
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	22.27	38.67	27.62	44.58	33.82
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	6.58	13.06	10.41	12.42	11.15
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	15.69	25.60	17.21	32.16	22.68

Sumber : Sakernas Februari 2019, Diolah

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja tidak penuh pada penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu sebesar 44,58 persen berbanding 27,62 persen. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan ini lebih memilih menjadi pekerja paruh waktu. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, ternyata tingkat pekerja tidak penuh di perdesaan (38,67 persen) lebih tinggi dibanding di perkotaan (22,27 persen).

#### d. Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan

Dalam analisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor informal atau jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik dan pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Tabel 8. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan,

Februari 2017-2019			
Status Pekerja	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	44.47	43.21	35.97
SMP	17.72	16.71	16.45
SMA Umum	20.21	22.73	25.96
SMA Kejuruan	4.88	4.40	4.82
Diploma I/II/III	1.91	1.91	3.50
Universitas	10.82	11.03	13.30
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sakernas Februari 2017-2019, Diolah

Selama periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2019, penduduk yang bekerja di Maluku Utara paling banyak berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 44,17 persen pada Februari 2017, meningkat menjadi 43,21 persen pada Februari 2018, kemudian turun menjadi 35,97 persen pada Februari 2019.

Tingkat pendidikan pekerja terbanyak kedua adalah SMA Umum. Persentasenya selalu terus mengalami peningkatan, yaitu dari 20,21 persen pada Februari 2017 menjadi 22,73 persen pada Februari 2018 dan menjadi 25,96 persen pada Februari 2019.

Secara umum, penduduk yang bekerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan dasar (SMP kebawah) meskipun selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Persentasenya mencapai 62,19 persen pada 2017. Pada 2018 menurun menjadi 59,92 persen dan pada 2019 menurun lagi menjadi 52,42 persen. Selama tiga tahun terakhir peningkatan terjadi pada kelompok pendidikan SMA Umum, Diploma I/II/III dan Universitas. Pada Februari 2019 persentasenya masing-masing 25,96 persen, 3,50 persen dan 13,30 persen.

*Penduduk yang bekerja di Maluku Utara masih didominasi penduduk berpendidikan dasar (SMP kebawah).*

Tabel 9. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2019

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	20.68	42.38	34.56	38.40	35.97
SMP	13.16	17.83	17.37	14.84	16.45
SMA Umum	31.25	23.75	29.35	20.10	25.96
SMA Kejuruan	6.73	4.02	5.78	3.15	4.82
Diploma I/II/III	4.58	3.05	1.63	6.75	3.50
Universitas	23.60	8.97	11.30	16.76	13.30
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sakernas Februari 2019, Diolah

Menurut daerah tempat tinggal, proporsi penduduk yang bekerja di wilayah desa berpendidikan SD ke bawah sangat besar, yaitu mencapai 42,38 persen. Sementara di wilayah kota, kelompok terbesar penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SMA Umum, yaitu sebesar 31,25 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan, masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu 34,56 persen untuk laki-laki dan 38,40 persen untuk perempuan.

### INDIKATOR PENGANGGURAN

*T i n g k a t Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/ mempersiapkan usaha.*

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

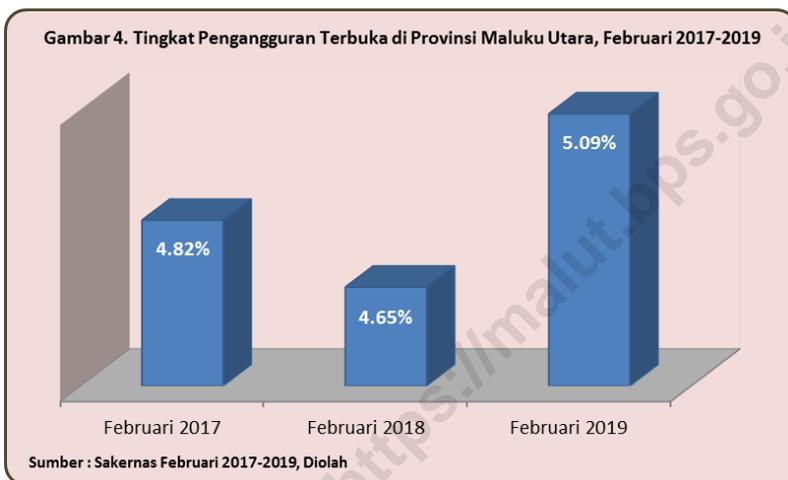
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi. Tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa

didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup. didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan secara aktif atau tidak mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja dan indikasi kegagalan mencari pekerjaan.

*Dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara, sekitar 5 orang diantaranya adalah penganggur.*



Pada Februari 2019, TPT Maluku Utara adalah sebesar 5,09 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara terdapat sekitar 5-6 orang penganggur. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, TPT di Maluku Utara berfluktuasi. Turun sedikit dari 4,82 persen pada Februari 2017 menjadi 4,65 pada Februari 2018, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 5,09 persen pada Februari 2019.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2017-2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari 2017	6.81	3.98	3.90	6.33	4.82
Februari 2018	5.46	4.33	3.66	6.21	4.65
Februari 2019	5.57	4.89	5.01	5.22	5.09

Sumber : Sakernas Februari 2017-2019, Diolah

Menurut klasifikasi wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan. Pada Februari 2019 TPT perkotaan adalah sebesar 5,57 persen, sedangkan TPT pedesaan sebesar 4,89 persen.

Dibanding periode sebelumnya, dalam tiga tahun terakhir tingkat pengangguran di perkotaan mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran di perkotaan tercatat sebesar 6,81 persen pada 2017, turun menjadi 5,46 persen pada 2018. Pada 2019, tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,57 persen. Keadaan yang berbeda terjadi di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran di pedesaan terus meningkat dari 3,98 persen pada 2017 menjadi 4,33 persen pada 2018, dan kembali meningkat menjadi 4,98 persen pada Februari 2019.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka pada penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada Februari 2018, tercatat tingkat pengangguran perempuan sebesar 6,21 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada penduduk laki-laki adalah 3,66 persen atau sekitar separuh dari tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan.

*T i n g k a t pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK, yaitu sebesar 10,72 persen pada Februari 2019.*

Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok lulusan SMK, yaitu sebesar 10,72 persen. Pada urutan kedua, tingkat pengangguran terbuka berada pada kelompok lulusan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 9,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka paling rendah berada pada kelompok lulusan SMP dan SD, yaitu sebesar 2,39 persen dan 2,56 persen.

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2019

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	2.13	2.64	2.36	2.86	2.56
SMP	3.19	2.13	1.54	4.05	2.39
SMA Umum	7.53	8.87	8.65	7.76	8.40
SMA Kejuruan	14.52	7.85	12.58	4.24	10.72
Diploma I/II/III	10.96	8.04	18.01	4.89	9.19
Universitas	3.13	7.01	1.72	8.60	5.01
Maluku Utara	5.57	4.89	5.01	5.22	5.09

Sumber : Sakernas Februari 2019, Diolah

## LAMPIRAN

### TABEL DAN GRAFIK



**Tabel Lampiran 1. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota, 2016-2019**

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2018

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halimahera Barat	112,722	114,502	116,513	118,287
Halimahera Tengah	51,315	52,813	54,190	55,728
Kepulauan Sula	97,177	99,196	100,967	102,886
Halimahera Selatan	223,460	227,280	231,217	235,090
Halimahera Utara	183,596	187,104	190,531	193,851
Halimahera Timur	87,680	90,070	92,618	95,005
Pulau Morotai	62,412	64,001	65,573	67,284
Pulau Taliabu	51,316	51,928	52,503	53,018
Ternate	218,028	223,111	228,105	233,208
Tidore Kepulauan	98,206	99,337	100,415	101,414
Maluku Utara	1,185,912	1,209,342	1,232,632	1,255,771

**Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara**

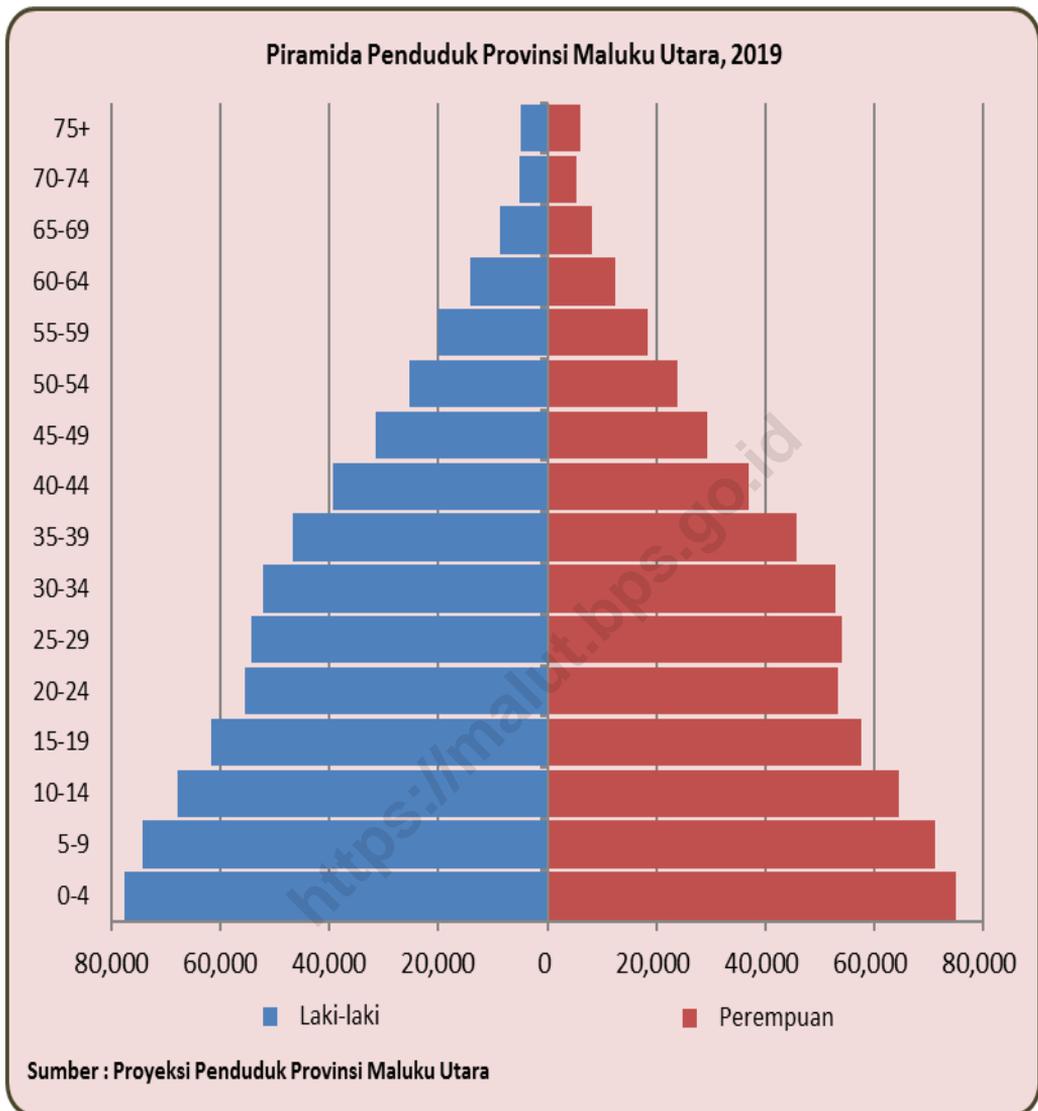
**Tabel Lampiran 2. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019**

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	77,722	74,989	152,711
5-9	74,339	71,250	145,589
10-14	68,003	64,709	132,712
15-19	61,686	57,600	119,286
20-24	55,603	53,308	108,911
25-29	54,288	54,109	108,397
30-34	52,198	52,973	105,171
35-39	46,865	45,770	92,635
40-44	39,498	37,110	76,608
45-49	31,634	29,342	60,976
50-54	25,456	23,838	49,294
55-59	20,142	18,427	38,569
60-64	14,082	12,548	26,630
65-69	8,653	8,199	16,852
70-74	5,191	5,401	10,592
75+	4,832	6,006	10,838
<b>Jumlah</b>	<b>640,192</b>	<b>615,579</b>	<b>1,255,771</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Gambar Lampiran 1. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara, 2019

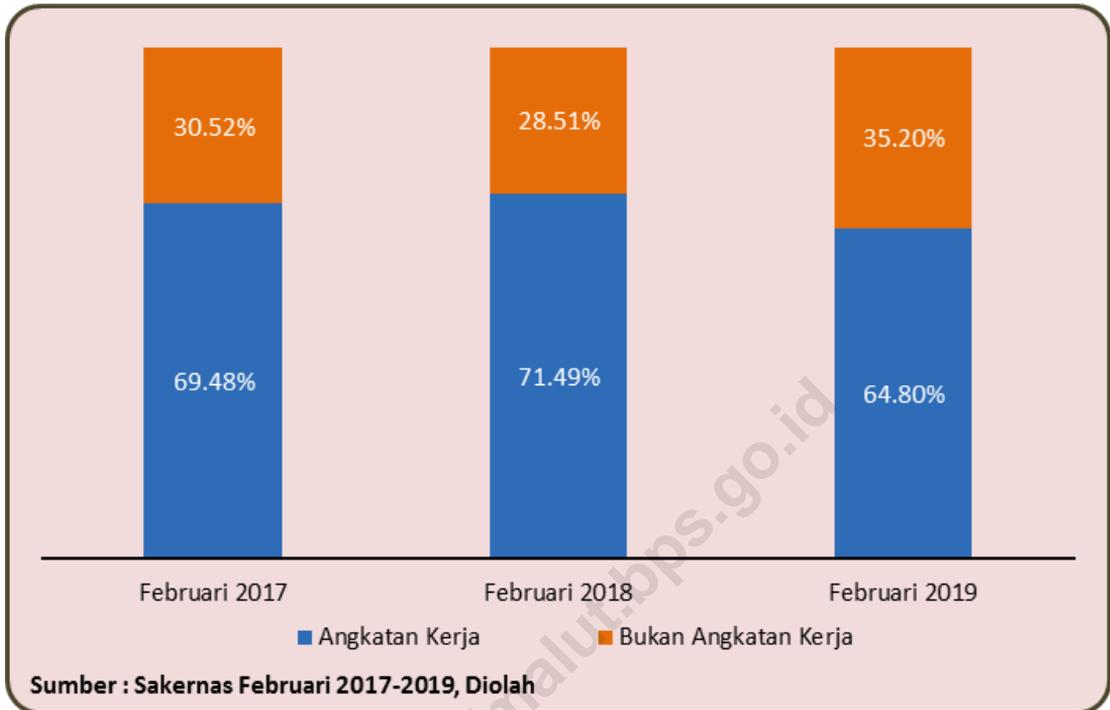


**Tabel Lampiran 3. Penduduk Usia Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2017-2019**

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	801 856	822 446	841080
2. Angkatan Kerja	557 120	587 972	544980
Bekerja	530 271	560 603	517249
Penganggur	26 849	27 369	27731
3. Bukan Angkatan Kerja	244 736	234 474	296100
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,48	71,49	64,80
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,82	4,65	5,09
6. Pekerja Tidak Penuh	170 661	189 857	174942
Setengah Penganggur	56 748	62 434	57655
Paruh Waktu	113 913	127423	117287

Sumber : Sakernas Februari 2017-2019, Diolah

**Gambar Lampiran 2. Persentase Penduduk Usia Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2017-2019**



**Tabel Lampiran 4. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Lapangan Usaha Utama, Februari 2018-2019**

Lapangan Usaha	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,84	41.69
B Pertambangan dan Penggalian	3,81	3.21
C Industri Pengolahan	8,54	6.56
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0.38
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,15	0.42
F Konstruksi	5,66	4.31
G Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	14,94	11.92
H Transportasi dan Pergudangan	4,58	5.03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	2.58
J Informasi dan Komunikasi	0,47	0.34
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	1.20
L Real Estat	-	0.06
M, N Jasa Perusahaan	0,80	0.38
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,41	10.80
P Jasa Pendidikan	5,13	7.55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,33	1.49
R, S, T, U Jasa Lainnya	2,36	2.08
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Sakernas Februari 2018-2019, Diolah

**Tabel Lampiran 5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2017-2019**

Tingkat Pendidikan	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	1,41	1,70	2,56
Sekolah Menengah Pertama	4,78	1,46	2,39
Sekolah Menengah Atas	8,41	7,14	8,40
Sekolah Menengah Kejuruan	9,31	14,21	10,72
Diploma I/II/III	21,58	7,38	9,19
Universitas	5,72	10,23	5,15
<b>Total</b>	<b>4,82</b>	<b>4,65</b>	<b>5,09</b>

Sumber : Sakernas Februari 2017-2019, Diolah

## GLOSARIUM

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.
- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
  - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun keatas.
  - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate – 97712  
Telp: (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301  
Homepage: <https://malut.bps.go.id>  
Email: [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)

ISSN 2654-9638



9 772654 963000